



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ALASAN BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN PADA MASYARAKAT  
ADAT NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**GUSMILA  
11521201494**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1441 H/2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul: **TRADISI *BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN* DI NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA**  
**DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.**

Yang ditulis oleh:

Nama : GUSMILA  
 Nim : 11521201494  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. Irdamisraini, MA  
 NIP.1964070719930332001

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ALASAN-ALASAN BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN PADA MASYARAKAT NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, yang dituliseleh :

Nama : **GUSMILA**  
 NIM : **11521201494**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga (AH)**  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : **Selasa 22 Oktober 2019**  
 Waktu : **08.00 Wib**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

.....

Sekretaris  
**Yuni Herlina, SHI, M.Sy**

.....

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi B, M.Ag**

.....

Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

.....  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **ALASAN-ALASAN BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN PADA MASYARAKAT NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh :

Nama : **GUSMILA**  
 NIM : 11521201494  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019  
 Waktu : 08.00 Wib  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Sekretaris  
**Yuni Herlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi B, M.Ag**

Penguji II  
**Haswir, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni, S.Sos., MM**  
 NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

#### **GUSMILA (2019): ALASAN *BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN* PADA MASYARAKAT ADAT NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota yang banyak menimbulkan persoalan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan juga banyak menimbulkan kemudhoratan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, Apa hal-hal yang ditimbulkan dari *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 20 orang yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, 10 orang tua pelaku *balamo-lamo maso batunangan* dan 2 orang *niniak mamak*. Jumlah sampel yang diambil yaitu 16 orang yang terdiri dari 10 orang yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, 4 orang tua pelaku *balamo-lamo maso batunangan* dan 2 orang *niniak mamak* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *balamo-lamo maso batunangan* yang terjadi pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif. Kebiasaan masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota merupakan '*urf fasid*' yaitu '*urf* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' (Al-qur'an dan hadits), untuk itu *balamo-lamo maso batunangan* yang menimbulkan kemaksiatan sebaiknya ditinggalkan karena tidak sesuai menurut hukum Islam.

Kata kunci : Batunangan (*khitbah*)

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan melimpahkan setetes dari luas ilmu-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Alasan Balamo-Lamo Maso Batunangan pada Masyarakat Adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia serta menuntun kita semua kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ketika penyusunan Penelitian ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yakni :

1. Ayahanda Gusriyal dan Ibunda Minarti yang sangat tercinta, saudara tercinta Dasrul Efendi dan Tomi Yulia, serta saudari tercinta Wahyu Darmila dan Septi Aisyah beserta seluruh keluarga yang berada di Nagari Maek yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Akmal Abdul Munir Lc., M.A dan bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Drs. Irdamisraini, M.A, selaku pembimbing dalam penyelesaian penelitian skripsi ini yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis bahkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Drs. Yusliati, M.A, selaku dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
10. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. *Niniak Mamak* dan masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam penelitian skripsi ini.

12. Ibuk kos tercinta Ibuk Hartati yang telah membimbing penulis selama ada dikos ini serta sahabat C9 Squad yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan Sarjana Hukum Keluarga terutama sahabat pejuang skripsi Diah Rahmi Fantari, S.H (Beibi), Fadilatul Ilmi (Amak) S.H, Nurlaili Hidayah Lubis (Wingky) S.H, M. Taufik (Motivator) S.H, Ninik Istifaroh (Terkocak) S.H, dan Riswan Hasibuan (Motivator) S.H, yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga/C angkatan tahun 2015, yang telah menemani hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan sahabat Kukerta angkatan ke-42 Desa Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mudah-mudahan atas segala bantuan yang telah diberikan menjadi amalan

seoleh di sisi Allah SWT, Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Oktober 2019  
Penulis,

**GUSMILA**  
**NIM. 11521201494**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Sejarah Nagari Maek.....	15
B. Keadaan Geografis dan Demografis.....	16
C. Keadaan Pendidikan.....	17
D. Mata Pencaharian Penduduk.....	19
E. Agama .....	20
F. Adat Istiadat.....	21
<b>BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>PERTUNANGAN DAN ‘URF.....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan.....	25
B. Pertunangan.....	37
C. ‘Urf.....	47
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Alasan <i>balamo-lamo maso batunungan</i> pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	51



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hal-hal yang ditimbulkan dari <i>balamo-lamo maso batunangan</i> pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	60
C. Tinjauan hukum Islam mengenai <i>balamo-lamo maso batunangan</i> pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	62
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sarana Pendidikan Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	18
Tabel 2.2	Mata Pencaharian Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	19
Tabel 2.3	Sarana Ibadah Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.....	20

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan sia-sia semata, akan tetapi ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan definisi perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan menjadikan hubungan pergaulan yang halal dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Perkawinan termasuk perbuatan ibadah, sehingga di dalamnya terkandung maksud dan tujuan akhir untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Mengenai tujuan perkawinan dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Ruum(30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>2</sup>

Perkawinan mengandung beberapa pokok bahasan yang diatur secara sistematis. Sebagai langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih pasangan yang akan diajak untuk hidup bersama. Setelah melihat pasangan yang sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, langkah selanjutnya adalah meminang atau *khitbah*.<sup>3</sup>

Peminangan atau *khitbah* dalam ilmu fiqh mengandung arti permintaan.<sup>4</sup> Menurut istilah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab I huruf a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Selanjutnya Pasal 11 KHI juga mengatakan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan

<sup>2</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Jumanatul Ali-ART, 2004), h. 406.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 19.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhmmad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 8.

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula melalui perantara yang dapat dipercaya.<sup>6</sup>

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan harus dilakukan bahkan wajib hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.<sup>7</sup>

Hukum tentang meminang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ رَأً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bogor : Rhedbook Publisher, 1976), cet ke-1. h. 505.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 64.

<sup>8</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertunangan adalah perjanjian biasa untuk membuat akad perkawinan, sehingga ia bukan termasuk dalam jenis akad. Dengan adanya perjanjian tersebut maka secara tidak langsung atau langsung calon mempelai telah terikat pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah disebut sebagai masa pertunangan.<sup>9</sup> Pertunangan pada dasarnya bertujuan untuk melihat bagaimana rupa dan akhlak calon pasangan dan juga untuk memastikan si perempuan sedang tidak dalam pinangan orang lain.<sup>10</sup>

Dalam pertunangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terutama larangan-larangan yang ditentukan oleh syari'at Islam, misalnya saja dilarang *berkhalwat* (menyendiri) atau empat mata dengan wanita pinangan tanpa ditemani oleh mahram, bergaul bebas dengan tunangan seperti pergi ke tempat-tempat hiburan, berboncengan berdua dan lain-lain sampai akad nikah dilaksanakan.<sup>11</sup>

Dalam nash, tidak ada ketentuan khusus yang menerangkan berapa lamanya jarak pertunangan dengan akad nikah, bisa satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan melebihi dari itu. Hal tersebut dikembalikan kepada *al-'urf* (kebiasaan) yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Namun tradisi atau kebiasaan tersebut tidak boleh pula bertentangan dengan syari'at Islam. Allah SWT menyukai agar sesuatu yang baik tersebut dilakukan

<sup>9</sup> Soemati, *Hukum Perkawinan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 23.

<sup>10</sup> Ellie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 17-18.

<sup>11</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*, ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secepatnya, karena mempercepat sesuatu yang baik sangat dianjurkan terutama dalam hal menikah. Karena terkadang terlalu lama jarak antara *khitbah* dengan akad nikah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi *khalwat*, perzinaan. Untuk menghindari semua ini maka wajib disegerakan akan nikah.<sup>12</sup>

Banyak nash yang melarang tentang berkhawat dan mendekati zina sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra (17) : 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>13</sup>

Kemudian terdapat juga dalam hadits Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاتَّخِذْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: اِرْجِعْ فَمُجِّعٌ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه البخاري)<sup>14</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Janganlah seorang laki-laki berduaan (berkhawat) dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut.’ Lalu berdirilah seseorang dan

<sup>12</sup> Saifuddin Sa’dan. *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam*, Online Journals diakses pada 07 November 2018 dari <http://jurnal/2017/ar-Raniry.ac.id>.

<sup>13</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit.*, 285.

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), Cetke-1, h. 1333. Lihat juga Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Muassasah Risalah, th), Jilid 3, h. 339.



berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.'" (HR. Al-Bukhari no. 5233 dan Muslim 2/975).

Sehubungan dengan ini, tepatnya masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, terdapat *balamo-lamo maso batunangan* yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi yang cukup lama ada *maso batunangan* itu 1,5 tahun, 2 tahun bahkan lebih lama dari itu, dan paling cepat 1 tahun. Adapun alasan mereka *balamo-lamo maso batunangan* seperti mereka belum siap melakukan pernikahan, ikut-ikutan saja agar ada ikatan yang pasti dan mereka takut tidak bisa bebas. Dalam kegiatan sehari-hari di samping masyarakat memiliki kesadaran beragama, masyarakat juga meyakini adat atau kebiasaan, meskipun tidak semua masyarakat melaksanakan tradisi tersebut, namun sebagian masyarakat masih meyakini dan terbiasa dengan *balamo-lamo maso batunangan*.<sup>15</sup>

Berikut beberapa contoh kasus yang melakukan *batunangan* yang *balamo-lamo* di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota:

<sup>15</sup> *Balamo-lamo maso batunangan* merupakan adat teradat yaitu peraturan-peraturan yang dibuat guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang dalam pepatah-petitih Adat. Bagaimana sebaiknya penetapan aturan-aturan pokok tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pokok yang telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek-moyang dahulunya. Sebagai contoh dikemukakan seperti *Abih sandiang dek Bageso*, *Abih miyang dek bagisiah*. Artinya nenek-moyang melalui pepatah ini melarang sekali-kali jangan bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda sebelum nikah (setelah Islam) atau kawin (sebelum Islam)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Iles dan Iwal yang *batunangan* pada tanggal 03 Maret tahun 2018 dan menikah pada tanggal 08 Agustus 2019. Bertunangan lebih kurang berjalan sekitar 1,5 tahun. Alasan mereka berdua *balamo-lamo maso batunangan* karena mereka tidak mau terkekang apabila sudah menikah. Padahal keduanya sudah mampu untuk menikah. Efek yang terjadi setelah mereka *batunangan*, mereka sering berduan (*berkhalwat*) bahkan hamil diluar nikah karena orang tua maupun ninik mamak tidak membatasi lagi sebab mereka telah *batunangan*. Karena sudah terjadi hamil diluar nikah, barulah mereka berdua di nikahkan untuk menjaga aib.<sup>16</sup>
2. Toni dan Ayu *batunangan* pada tanggal 10 Agustus tahun 2017 dan menikah pada tanggal 26 Januari 2019. Bertunangan lebih kurang berjalan sekitar 1 tahun 5 bulan. Alasan mereka berdua *balamo-lamo maso batunangan* karena mereka tidak mau terkekang apabila sudah menikah. Padahal keduanya sudah mampu untuk menikah. Efek yang terjadi setelah mereka *batunangan*, mereka sering berduan (*berkhalwat*) karena orang tua maupun *niniak mamak* tidak membatasi lagi sebab mereka telah *batunangan*.<sup>17</sup>
3. Deni *batunangan* dengan Syafitri pada tanggal 8 Januari 2017 dan berencana menikah pada tanggal 30 Desember 2018. Bertunangan lebih

<sup>16</sup> Iles, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

<sup>17</sup> Ayu, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 10 November 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan. Alasan mereka *batunangan* karena mereka sudah cukup lama berpacaran, untuk menghindari cemooh masyarakat setempat yang sering melihat Deni dan Syafitri pergi ketempat hiburan seperti orgen tunggal hingga larut malam. Namun setelah mereka *batunangan*, masyarakat tidak lagi mencemoohkan mereka meskipun masih sering pergi ketempat hiburan berduaan.<sup>18</sup>

Berangkat dari fenomena di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Alasan *Balamo-Lamo Maso Batunangan* Pada Masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Hukum Islam”**

#### B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka peneliti membatasi pembahasan ini mengenai alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota ditinjau menurut Hukum Islam.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

<sup>18</sup>Syafitri, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek , 10 November 2018.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota?
2. Apa hal-hal yang ditimbulkan dari *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota?

#### **D Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang ditimbulkan dari *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

##### **2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis, hasil penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan dalam perkawinan menurut tuntunan agama Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara baik di tengah masyarakat.
- c. Untuk perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Pulu Kota. Adapun yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena di lokasi ini penulis dapat menemukan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

##### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah orang yang *balamo-lamo maso batunangan*, orang tua kedua belah pihak yang *batunangan*, dan *niniak mamak* di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Objek dari penelitian ini adalah *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel.

Untuk data populasi ini dikarenakan tidak ada data yang valid di Nagari Maek, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan jumlah populasi sebanyak 32 orang yang terdiri dari 20 orang yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, 10 orang tua pelaku *balamo-lamo maso batunangan* dan 2 orang *niniak mamak*. Karena jumlah populasi cukup banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga, maka penulis mengambil sampel sebanyak 16 orang yang terdiri dari 10 orang yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, 4 orang tua pelaku *balamo-lamo maso batunangan* dan 2 orang *niniak mamak* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

### 5. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari orang yang *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literature yang ada dipustaka, dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut serta dalam acara pertunangan tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan pertunangan, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

<sup>19</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 8. Metode penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu mengungkapkan data khusus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan umum.

## Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I                    PENDAHULUAN**, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**, yang meliputi Demografis dan Geografis, Keadaan Pendidikan, Mata Pencaharian Penduduk, Agama dan Adat Istiadat.

**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN, PERTUNANGAN DAN ‘URF**, tentang a. Perkawinan yaitu Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan dan Larangan Perkawinan b. Pertunangan yaitu Pengertian Pertunangan, Dasar Hukum Pertunangan, Hukum dilaksanakan Pertunangan, Tujuan Pertunangan, Hikmah Pertunangan, Dampak yang ditimbulkan dalam pertunangan, Hal-hal yang dilarang dalam Pertunangan, Akibat Batalnya Pertunangan, Sebab-sebab Putusnya Pertunangan c. ‘Urf

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**, yang meliputi alasan *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, Hal-hal yang ditimbulkan dari *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, tinjauan hukum Islam mengenai *balamo-lamo maso batunangan* pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota

**BAB V**

**PENUTUP**, yang meliputi Kesimpulan dan Saran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Nagari Maek

Pada masa dahulu penduduk Maek berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju ke Kampar. Sesampainya di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati, dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sunagai yang banyak ikannya hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang ke sungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan *Maek* dalam bahasa tamil yang artinya *Rakus*. Perkampungan inilah yang kemudian membuat menhir sebagai temoat pemujaan.<sup>20</sup>

Secara administrasi pada masa penjajahan belanda sampai pada akhir tahun 70an yaitu masa pertukaran sistem pemerintahan nagari kepada pemerintahan desa dan awal tahun 80an nagari Maek dibagi menjadi 5 buah desa yaitu Desa Tigo Sakato, Desa Paruso, Desa Ronah, Desa Koto Tinggi dan Desa Nenan, namun secara wialyah adat tetap dinamakan Maek. Pada tahun 2001, lima buah Desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah pemerintahan Nagari Maek.

<sup>20</sup> Data diperoleh dari kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Keadaan Geografis dan Demografis**

**1. Letak Geografis**

Nagari Maek adalah suatu daerah yang terletak di daerah Kecamatan Bukit barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Wilayahnya terletak pada 6-11 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Nagari Maek ini dikelilingi oleh perbukitan yang sanga luas yang menurut penduduk maek dulunya merupakan lautan yang kini telah menjadi daratan. Jarak dari ibuk kota kecamatan 18 km, dari ibu kota kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 km. Luas Nagari Maek 12206 km<sup>2</sup>.

Nagari Maek ini mempunyai 12 Jorong yaitu Koto Godang, Sopan Tanah, Bungo Tanjuang, Aur Duri, Ampang Gadang I, Ampang Gadang II, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III, Ronah, Sopan Gadang, Nenan. Terdapat 6 suku yaitu suku Melayu, Suku Kampai, Suku mandailing, Suku Domo, Suku Pitopang dan Suku Piliang. Sedangkan menegenai batas-batas wilyah Nagari Maek sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Koto Lamo atau Kec. Kapur IX
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Banja Loweh
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Rao Mapat Tunggal Kab. Pasaman

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Talang Maur atau Kec. Mungka<sup>21</sup>

Bentuk permukaan nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan daratan yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Nagari Maek dibagi atas kemiringan 8-15% dan kemiringan >45%, dengan ketinggian 617 diatas permukaan laut.

#### 2. Keadaan Demografis

Penghuni Nagari Maek berjumlah 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 kepala keluarga. Pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Maek adalah 25,7% Petani/Peternak, 1% Pedagang, 0,9% PNS, 0,5% Pegawai Swasta, 0,01% TNI/Polri, 0,3 Tukang, 0,36% Bidan dan Perawat, 0,5% Pensiunan, 9,6% Pengrajin dan sisanya adalah Pelajar/Mahasiswa serta pengangguran.

#### Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran agar orang-orang bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan dimasyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya pendidikan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nagari Maek masyarakat memiliki tingkat pendidikan sangat rendah

---

<sup>21</sup> Data diperoleh dari kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota tahun 2019.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kurangnya kesadaran. Padahal dengan era globalisasi yang canggih ini sangat dibutuhkan pendidikan.

Nagari Maek memiliki sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1**

**Jumlah Sarana Pendidikan Nagari  
Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	13 Unit
2	SD	11 Unit
3	SLTP/MTsN	2 Unit
4	SLTA/SMA	1 Unit
5	SLB	1 Unit
JUMLAH		28 Unit

*Sumber data : Kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019<sup>22</sup>*

Untuk sarana pendidikan pada tingkat nagari, sarana pendidikan yang telah ada telah tersedia pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel, sarana pendidikan paling banyak yaitu tingkat SD sebanyak sebelas buah, sedangkan paling sedikit SLB dan SMA.

<sup>22</sup> Data diperoleh dari kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Mata Pencaharian Penduduk**

Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Nagari Maek sebagian besar petani dan berkebun namun ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, bidan, pengrajin industri rumah tangga, pedagang dan sopir. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Maek mengadu nasib ke kota-kota besar, namun ada juga tingkat perekonomian masyarakat Nagari Maek golongan atas, menengah dan golongan bawah.

**Tabel II.2**

**Mata Pencaharian Penduduk Nagari Maek Kec. Bukik Barisan  
Kab. Lima Puluh Kota**

No	Jenis Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1	Petani/Peternak	2.570	25,7%
2	Pedagang	100	1%
3	PNS	90	0,9%
4	TNI/POLRI	10	0,01%
5	Tukang	30	0,3%
6	Bidan/Perawat	36	0,36%
7	Pensiunan	50	0,5%
8	Pegawai Swasta	50	0,5%
9	Pengrajin	960	9,6%
Jumlah		3.896	38.87%

*Sumber : Data kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Agama

Agama merupakan suatu terpenting dalam masyarakat karena salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui sebagai satu-satunya sumber nilai luhur dan universal memiliki peranan penting yang paling tinggi harganya bagi setiap manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi kehidupan dan pengendalian diri. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Nagari Maek 100% memeluk agama Islam, tidak ada pendatang ke Nagari Maek yang beragama non Islam. Kemudian untuk lebih jelas dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel II.3**

### Sarana Ibadah di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	14
2	Surau/Musholla	17
	Jumlah	31

*Sumber : Data kantor wali nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sarana tempat ibadah di Nagari Maek yaitu 14 buah dan surau/musholla ada 17 buah. Jadi jumlah tempat ibadah di Nagari Maek adalah 31 buah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun uraian kegiatan keagamaan masyarakat sebagai berikut:

1. Mesjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti sholat lima waktu, sholat jum'at, Khatam Al-qur'an, musyawarah masyarakat antar suku acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'rad, dan mengadakan Lomba MTQ, kultum, cerdas cermat ketika bulan Ramadhan.
2. Surau/Musholla merupakan tempat kegiatan keagamaan masyarakat seperti sholat magrib berjama'ah dan belajar mengaji.

#### F. Adat Istiadat

Adat merupakan hukum kebiasaan, aturan sopan santun (tata krama), kesusilaan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Dalam adat Minangkabau memiliki slogan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang berarti adat bersandar syara', syara' bersandar kepada kitabullah (Al-Qur'an), selalu menjadi pegangan jika kita berbicara mengenai relasi adat dan agama pada masyarakat. Adapun adat istiadat minangkabau sebagai berikut:

1. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana Adat ini adalah *adat yang tak lekang oleh paneh tak lapuak oleh hujan, dipindah tak layu, dibasuah habis air*. Artinya semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tidak akan berubah. Dimana ketentuan alam tersebut adalah aksioma tidak bisa dibantah kebenarannya. Sebagai contoh dari benda Api dan Air, ketentuannya membakar dan membasahkan, hutan gundul menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman dan kebaikan membuahkan kebahagiaan. Semua akan tetap abadi sampai hari kiamat dengan sifat tersebut, kecuali Allah sebagai sang penciptanya menentukan lain (merobahnya).<sup>23</sup>

#### 2. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan adalah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini dibuat oleh *datuak nan duo*. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian dan sosial budaya.

Sebagaimana dikemukakan oleh nenek-moyang orang Minangkabau, maka disusunlah ketentuan-ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam.

Karena pepatah-petitih tersebut dicontoh dari ketentuan alam sesuai dengan fenomenanya masing-masing, maka kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan sumbernya tidak boleh dirobah-robah walau dengan musyawarah mufakat sekalipun. Justru kedua jenis Adat pada huruf a dan b karena tidak boleh dirobah-robah disebut dalam pepatah :

*Adat nan tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan,  
dianjak tak layua, dibubui tak mati,  
dibasuah bahabih aia, dikikih bahabih basi.*

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Sinar Sepro, 1984), h. 140-143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya adalah Kebenaran dari hukum alam tersebut . Selama Allah SWT, sebagai sang pencipta ketentuan alam tersebut tidak menentukan lain, maka ketentuan alam tersebut tetap tak berubah.

#### 3. Adat Teradat

Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang (Dt. Perpatiah Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan) dalam pepatah-petitih Adat. Bagaimana sebaiknya penetapan aturan-aturan pokok tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pokok yang telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek-moyang dahulunya.

Sebagai contoh kita kemukakan beberapa pepatah-petitih, mamang, bidal, Adat yang telah diadatkan oleh nenek moyang tersebut diatas seperti *Abih sandiang dek Bageso, Abih miyang dek bagisiah*. Artinya nenek-moyang melalui pepatah ini melarang sekali-kali jangan bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda sebelum nikah (setelah Islam) atau kawin (sebelum Islam).<sup>24</sup>

Begitupun peresmian *Sako* (gelar pusaka) kaum atau penghulu, ada nagari yang memotong kerbau, ada banteng, ada kambing, ada dengan membayar uang adat kenagari yang bersangkutan. Semuanya adalah aturan pelaksanaan dari peresmian satu gelar pusaka kaum (*Sako*) yang diambil keputusannya melalui musyawarah mufakat. dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh penghulu-penghulu disuatu nagari melalui musyawarah mufakat sehubungan dengan kesukaan atau kebiasaan anak nagari seperti kesenian, olah raga, pencak silat randai, talempong, pakaian laki-laki, pakaian wanita, barang-barang bawaan kerumah mempelai begitu juga marawa, ubur-ubur, gabah-gabah, pelamina dan sebagainya yang berbeda-beda disetiap nagari. Juga berlaku pepatah yang berbunyi :

*Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo,  
lain nagari lain adatnyo (Istiadatnya) .*

Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang (Dt. Perpatiah Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan) dalam pepatah-petitih Adat. Bagaimana sebaiknya penetapan aturan-aturan pokok tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pokok yang telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek-moyang dahulunya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN, PERTUNANGAN DAN 'URF

### PERKAWINAN

#### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (الزواج). Kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti "kumpul atau mengumpul, juga dimaknakan bersetubuh".<sup>26</sup> Nikah (za-wa-ja) diartikan dengan *aqdu al-tazwij*<sup>27</sup> yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (wath'u al-zaujah) bermakna "menyetubuhi istri". Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut istilah pengertian pernikahan para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abu Ishrah mendefenisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 208 dan h. 828.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 1461.

<sup>28</sup> Nurhayati Zein, *Fikih Munakahat*, (Pekanbaru : M utiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>29</sup>

2. Menurut Zakiyah Darajat mendefenisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.<sup>30</sup>
3. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefenisikan sebagai pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *misaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Disimpulkan dari buku M. Rifai'i yang berjudul fiqih Islam lengkap pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h. 3.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 8.

<sup>31</sup> K.H. Hasbullah Bakry, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, (Jambatan : Anem Kosong Anem, 1978), h. 3.

<sup>32</sup> Syamsuhardi Irsyad, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14.

<sup>33</sup> M. Rifai'i, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Semarang : Karya Toha Putra, 2014), h. 240.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.<sup>34</sup> Mengenai dasar hukum perkawinan dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. Yasin (36): 36 sebagai berikut:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".*<sup>35</sup>

Para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Para Sarjana Ilmu Alam itu berpegang dengan ayat-ayat di

<sup>34</sup> H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8-9.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Jumanatul 'Ali ART), 1442.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dan ayat lainnya.<sup>36</sup> Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Dzariyat (51): 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>37</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, inilah Allah SWT yang menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>38</sup> Pernikahan dapat menciptakan ketentraman, damai dan mendapatkan kasih sayang sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ruum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>39</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah

<sup>36</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 15.

<sup>37</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 2012), h. 417.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 12.

<sup>39</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Syamil Qur'an, 2010), h. 406.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Seseorang tidak boleh berbuat semaunya saja, Allah tidak membiarkan manusia seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.<sup>40</sup>

### 2. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud saw dia berkata:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ جَاءَ<sup>41</sup>

Artinya: “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami, Hai sekelompok pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.” (Muttafa’alaihi)<sup>42</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan tidaklah sama terhadap semua orang karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang telah dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya. Adapun mengenai hukum nikah dibagi menjadi beberapa hukum yaitu :

<sup>40</sup> Al-Hamdani, *Loc. Cit.*,

<sup>41</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : th), Jilid 15, h. 498. Juga dilihat Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Putra Semarang, t.th), h. 185.

<sup>42</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Iq, 2012), Jilid 6, h. 255.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang telah mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melakukan pernikahan serta dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina kalau tidak disegerakan untuk menikah.

b. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah bagi seorang yang mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjerumus berbuat zina apabila belum melakukan pernikahan.

c. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi seorang yang tidak mampu lahiriah atau bathiniah. Seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain seperti sakit atau lemah syahwat. Laki-laki yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan tidak tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat juga makruh hukumnya.<sup>43</sup>

d. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah bagi seorang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah belum

<sup>43</sup> Nurhayati Zein, *Op.Cit.*, h.7-9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadat apabila perbuatan tersebut dilakukannya.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.<sup>44</sup>

Adapun rukun nikah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan

Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Berjenis kelamin laki-laki

<sup>44</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*,h.11-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah
  - e. Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
  - f. Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
  - g. Tidak dipaksa
2. Adanya calon istri yang akan melakukan pernikahan

Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Berjenis kelamin wanita
  - b. Beragama Islam
  - c. Tidak sedang melakukan ihram baik dengan ihram haji atau umrah
  - d. Tidak sedang bersuami
  - e. Bukan mahram bagi calon suami
  - f. Tidak sedang menjalankan iddah
  - g. Diketahui oleh calon suaminya
  - h. Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut
3. Adanya wali dari pihak calon istri

Akad nikah menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.<sup>45</sup>

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan atau

<sup>45</sup> Nurhayati Zein, *Op.Cit.*, h. 11-12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain.<sup>46</sup>

4. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi laki-laki menyaksikan akad nikah tersebut

Adapun syarat-syarat menjadi saksi nikah sebagai berikut:

- a. Berjenis kelamin laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Sudah mencapai batas baligh
  - d. Berakal
  - e. Orang yang adil dan tidak fasik
  - f. Tidak idiot, tuli, bisu dan buta
  - g. Memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh wali dan suami
  - h. Tidak memiliki ingatan yang lemah
5. Shigat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon istri dan calon suami.

Ijab artinya ucapan wali dari pihak calon istri, sebagai penyerahan kepada calon suami. Sedangkan qabul artinya ucapan calon suami sebagai tanda penerimaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Djamaan Nur, *Op.Cit.*, h. 65.

<sup>47</sup> Nurhayati Zein, *Loc.Cit.*,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat sighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

## 5. Tujuan Perkawinan

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syaahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>48</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga ditimbulkan kebahagiaan yang artinya kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga dapat diringkas ada dua tujuan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 15-16.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 22-23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Perkawinan Yang Diharamkan

Diantara perkawinan yang diharamkan sebagai berikut:

### 1. Nikah Mut'ah

Secara etimologi mut'ah berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin mut'ah disebut juga sementara waktu atau kawin yang terputus. Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan.

### 2. Nikah Tahlil

Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Menurut terminologi nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.<sup>50</sup>

### 3. Nikah Syighar

Kata-kata syighar yang berasal dari bahasa arab yang berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya sewaktu kencing. Apabila dihubungkan dengan nikah atau disebut nikah syighar mengandung arti yang tidak baik,

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana tidak baiknya anjing mengangkat kakinya sewaktu kencing.

Dalam arti definitif ditemukan artinya dalam hadist Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar mutaffaq alaihi yang dikutip al-Shan'aniy dalam kitabnya sulubul as-salam yang artinya seseorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar.

Dalam bentuk perkawinan tersebut yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini tersebut. Kedua anak perempuan yang dikawini oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya.<sup>51</sup>

### B. Identifikasi Tentang Pertunangan

#### 1. Pengertian Pertunangan

Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa arab yang berarti berbicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet-3, h. 107-108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Khitbah* merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT mensyariatkan *khitbah* sebelum dilaksanakan ikatan perkawinan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.<sup>52</sup>

Pertunangan (*khitbah*) secara istilah adalah perjanjian biasa untuk membuat akad perkawinan, sehingga ia bukan termasuk dalam jenis akad. Dengan adanya perjanjian tersebut maka secara tidak langsung atau langsung calon mempelai telah terikat pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah disebut sebagai masa pertunangan.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertunangan

Dalam Al-Qur'an dan hadist banyak yang membicarakan tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi.<sup>54</sup>

Adapun dasar hukum tentang pertunangan (*khitbah*) terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah(2):235 sebagai berikut:

<sup>52</sup> Said Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Moh. Abidun Dkk, ( Jakarta : Cempaka Putih, 2011), h. 221.

<sup>53</sup> Soemati, *Hukum Perkawinan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 23.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*,h. 50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ رَأً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ<sup>55</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>55</sup>

Kemudian terdapat juga dalam hadits Rasulullah Saw:

عن جابر قال : سمعت النبي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Jabir, ia mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Apabila seseorang di antara kalian meminang wanita, lalu ia bisa melihat kepada wanita itu apa yang bisa menariknya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya”. (HR. Abu Daud dengan perawi-perawi tsiqat; shahih menurut al-Hakim)<sup>56</sup>

### 3. Hukum Dilaksanakan Pertunangan

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib (sunnah), namun kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa

<sup>55</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 38.

<sup>56</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 424. Lihat juga : Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, No. 832, terj. Cet. Ke-1, (Bandung : Al-Faraj, 2018), h. 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminangan harus dilakukan bahkan wajib hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.<sup>57</sup> Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.<sup>58</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13 juga menjelaskan tentang khitbah. Pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Selanjutnya pasal 12 menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnyanya. Perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Putusnya pertunangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pertunangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Pasal 13 menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan

<sup>57</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet ke-6., 64.

<sup>58</sup> Amir syarifuddin, *Loc.Cit.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>59</sup>

#### 4. Tujuan Pertunangan

Pertunangan bermaksud adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat. Pertunangan termasuk usaha pendahuluan dalam rangka sebelum pernikahan. Pertunangan pada dasarnya bertujuan:

- a. Terlebih dahulu untuk saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>60</sup>
- b. Untuk melihat bagaimana rupa dan akhlak calon pasangan.
- c. Untuk memastikan si perempuan sedang tidak dalam pinangan orang lain.<sup>61</sup>

#### 5. Hikmah Dilaksanakan Pertunangan

Pertunangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena pertunangan merupakan jalan mempelajari akhlak,

<sup>59</sup> Syamsuhardi Irsyad, *Op.Cit.*, h. 17-18.

<sup>60</sup> Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perpektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), h. 101.

<sup>61</sup> Ellie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 17-18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabiat dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika setelah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk melangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.<sup>62</sup>

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai wajib, selalu mempunyai hikmah. Adapun hikmah dari adanya pertunangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan pertunangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>63</sup> Untuk mengetahui secara jelas kebiasaan calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat hidup mulia dan tentram dengan suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam.<sup>64</sup>

#### 6. Dampak yang Ditimbulkan dalam Pertunangan

Pertunangan (*khithbah*) merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah dilangsungkan. Seringkali sesudah itu diikuti dengan memberikan maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam-

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 21.

<sup>63</sup> Amir syarifuddin, *Loc.Cit.*,

<sup>64</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, ( Jakarta : Amzah, 2009), h. 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam hadiah serta pemberian lainnya sebagai penguat ikatan , untuk memperkuat hubungan yang baru antara keduanya.

Sebenarnya pertunangan (*khitbah*) itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Pembatalan terhadap ikatan perjanjian itu, Islam tidak menjatuhkan hukuman material tetapi memandang perbuatan itu sebagai perbuatan tercela, karena termasuk ke dalam sifat orang munafik.<sup>65</sup>

Pertunangan (*khitbah*) itu tidak berdampak apapun maka kita tidak boleh mengharuskan peminang untuk membayar sejumlah uang atau yang lainnya, baik berupa maskawin, seserahan ataupun berupa hadiah. Oleh karena itu pertunangan tidak lain hanya sekedar perjanjian untuk mengikat akad nikah yang akan mendatang maka sebaiknya keduanya saling berkenalan dalam batasan yang disyariatkan. Sedangkan apa yang telah menjadi adat, seperti memberikan cincin tunangan atau seserahan merupakan hal yang tidak dilarang oleh syariat, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah dan hukumnya.<sup>66</sup>

#### 7. Hal-Hal yang Dilarang dalam Bertunangan

1. Berkhalwat (berdua) dengan tunangan dilarang karena adanya kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>67</sup> Mereka itu merupakan perempuan

<sup>65</sup> Djamaan Nur, *Op.Cit.*, h. 19.

<sup>66</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadlydan Ahmad Khotib, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 22.

<sup>67</sup> Sayyid sabiq, *Op.Cit*, h. 229.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asing bagi laki-laki yang mengkhitbahnya. Adapun hadist Rasulullah tentang larangan berkhawat dengan perempuan asing (bukan muhrim) dan duduk berdua dengannya kecuali jika ditemani oleh mahramnya. Seperti ayah, saudara, atau pamannya.<sup>68</sup> Hadist tersebut sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

إِفْرَأْنِي خَرَجْتُ حَاجَةً وَكُتِبَتْ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ائْجِعْ فَحُجَّ مَعَ إِفْرَأَتِكَ. (رواه البخاري)<sup>69</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Janganlah seorang laki-laki berduaan (berkhawat) dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahrom sang wanita tersebut.’ Lalu berdirilah seseorang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,’ maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, ‘Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.’” (HR. Al-Bukhari no. 5233 dan Muslim 2/975).

### 2. Empat mata dengan wanita pinangan

Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita tunangan, demikian juga wanita boleh melihat laki-laki tunangannya karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang ditempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*,h. 35.

<sup>69</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), Cet ke-1, h. 1333. Lihat juga Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Muassasah Risalah, th), Jilid 3, h. 339.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(muhrim). Bersepihan dengan seorang wanita lain hukumnya haram, kecuali bagi mahram atau suami sendiri.<sup>70</sup>

3. Bergaul dengan bebas seperti pergi ke tempat-tempat hiburan, boncengan berduan juga dilarang oleh syariat. Karena mereka berdua memiliki hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka.<sup>71</sup>
4. Tidak boleh dipinang oleh orang lain, karena ia berada dalam pinangan calon suaminya.<sup>72</sup>

#### 8. Akibat yang Ditimbulkan dari Pembatalan Pertunangan

Pembatalan mesti dilakukan secara sopan dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Pihak yang ingin membatalkan tidak boleh menyakiti dan mendapatkan ridho dari pihak yang dibatalkan. Pembatalan dapat dilaksanakan apabila menggunakan alasan yang kuat dan tidak berniat untuk menyakiti pasangan.<sup>73</sup>

Batalnya pertunangan bisa berakibat buruk yang menimpa salah satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi ataupun beban mental. Diantara contoh kerugian materi, yaitu apabila peminang laki-laki telah menyediakan tempat tinggal demi sebuah rumah tangga yang akan dibangun, lalu orang yang dipinang membatalkan peminangan atau apabila pihak perempuan telah menyiapkan perlengkapan rumah tangga dan juga

<sup>70</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>71</sup> Al-Hamdani, *Op.Cit.*, h. 34.

<sup>72</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 35.

<sup>73</sup> Nurhayati zein, *Op.Cit.*, h. 46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti dari pekerjaannya karena ia ingin bersiap-siap untuk menikah, lalu peminang laki-laki membatalkan pinangannya tanpa sebab. Diantaranya contoh kerugian mental adalah goresaan luka pada perasaan dan perbincangan orang banyak tentang dirinya atau yang sejenisnya.<sup>74</sup>

Secara prinsip peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang Peminangan, sebagai berikut:

- (1). Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>75</sup>

#### 9. Sebab-sebab Putusnya Pertunangan

Khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau wanita belum bersifat pasti. Pihak yang dilamar diberikan kesempatan berpikir untuk menetapkan diterima atau ditolaknya lamaran. Kesepakatan ini menjadi hak mutlak bagi pihak yang dilamar dan pihak pelamar tidak dibenarkan untuk memaksa.

Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bertunangan, maka akan dilakukan proses persiapan menuju pernikahan.

<sup>74</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit.*, h. 30-31.

<sup>75</sup> Syamsuhardi Irsyad, *Op.Cit.*,h. 17-18.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa ini, dibenarkan untuk melakukan pembatalan. Banyak hal yang menjadi penyebab putusnya hubungan pertunangan. Putusnya hubungan pertunangan bisa didasarkan kepada ketidaksesuaian dalam melaksanakan syarat yang ditetapkan bersama. Bahkan apabila fakta dilihat dan ditemukan tidak benar sesuai dengan informasi yang diterima, maka kedua belah pihak berhak untuk mengambil keputusan untuk memutuskan khitbah.<sup>76</sup>

### ‘Urf

Tradisi atau adat dalam *ushul fiqh* dikenal dengan ‘urf. ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عَرَفَ , يَعْرِفُ) yang sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik”.<sup>77</sup> Kata ‘urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>78</sup> Sedangkan pengertian ‘urf menurut istilah yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>79</sup>

‘Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: ‘ada, ya’udu (عاد, يعود) yang mengandung arti: (تكرار)

<sup>76</sup> Nurhayati zein, *Op.Cit.*, h. 45-46.

<sup>77</sup> Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet ke-2. h. 333.

<sup>78</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet ke-3. h. 153.

<sup>79</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h.104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni '*urf*' dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa '*urf*' dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan demikian '*urf*' dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Adapun macam-macam '*urf*' dari segi keabsahan terbagi menjadi dua, yaitu '*urf*' yang dianggap benar ('*urf shahih*') dan '*urf*' yang dianggap salah ('*urf fasid*'):

- a. '*Urf shahih*', yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan syara'.<sup>81</sup> Dengan maksud lain, tidak

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 388.

<sup>81</sup> Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 210.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.<sup>82</sup> *'Urf shahih* adalah *'urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.<sup>83</sup> Contohnya, mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah.

- b. *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun.<sup>84</sup> *'Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak dan kebalikan dari *'urf sahih* sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash maupun akal.<sup>85</sup> Misalnya, mengundang organ tunggal untuk hiburan pada saat pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) serta menyajikan minuman yang memabukkan untuk tamu.

Para Ulama sepakat, bahwasanya *'urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.<sup>86</sup> Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang

<sup>82</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke-2., h. 210.

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), Cet ke-6., h. 135.

<sup>84</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet ke-2., h. 100.

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj.*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke-14., h. 48.

<sup>86</sup> Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

'Urf sebagai salah satu metode ijtihad, maka seorang Mujtahid harus memeliharanya, karena berguna dalam pembentukan hukum, sebagaimana salah satu dari lima kaidah asasi (pokok), yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”<sup>87</sup>

Adat atau tradisi dianggap baik dandapat dinyatakan sebagai 'urf shahih, apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3. Tradisi itu dapat diterima oleh akal sehat.
4. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.<sup>88</sup>
5. Tradisi atau adat tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 418.

<sup>88</sup> Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditetapkan syarat dan ketentuannya dikutip dari buku karangan H.A. Dzajuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), Cet ke-1., h. 425.

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 425.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan *Balamo-lamo maso batunangan* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan memiliki alasan tertentu yaitu: takut terkekang apabila telah menikah, untuk memperjelas status hubungan kedua belah pihak, menghindari cemoohan masyarakat dan menunggu tamat kuliah.
2. *Balamo-lamo maso batunangan* yang terjadi pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif. Dampak negatifnya adalah banyak terjadi hamil diluar nikah, bebas berdua-duan pergi kemana-mana sehingga peluang untuk melakukan maksiat terbuka lebar, timbul rasa bosan dan mencoba untuk selingkuh yang berakhir dengan pertengkaran dan terjadinya pemutusan pertunangan.
3. Dalam pandangan hukum Islam *Balamo-lamo maso batunangan* yang merupakan kebiasaan masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan merupakan '*urf fasid*' yaitu '*urf*' tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' (Al-qur'an dan hadits), untuk itu *balamo-lamo maso batunangan* yang menimbulkan kemaksiatan sebaiknya ditinggalkan karena tidak sesuai menurut hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota harus memahami dan melihat lagi kebenaran kebiasaan tersebut, apakah bertentangan atau tidak dalam hukum Islam. Apabila bertentangan dengan hukum Islam, maka masyarakat harus menghilangkan kebiasaan tersebut dan tidak perlu lagi dipertahankan.
2. Diharapkan kepada lembaga UIN Suska dapat mengarahkan mahasiswa agar lebih banyak meneliti tentang kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengetahui kebiasaan yang bertentangan dan sesuai dengan hukum Islam.
3. Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhmmad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadlydan Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Darul Haq, 2012, Jilid 6
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996, Cet ke-6
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015)
- Ahmad, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Muassasah Risalah, th), Jilid 3
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra Semarang, th
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), Cetke-1
- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perpektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet ke-6
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinana Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, Cet-3
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, ( Jakarta : Sinar Sepro, 1984)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009 , Cet. ke-5

Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6

Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : th), Jilid 15

Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993

H.A. Dzajuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000, Cet ke-1

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit Jumanatul 'Ali ART

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 2012

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung : Syamil Qur'an, 2010

Ellie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013, cetakan 1

Ibhal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

K.H. Hasbullah Bakry, *Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, Djambatan : Anem Kosong Anem, 1978

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993

M. Rifai'I, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra, 2014

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011, Cet ke-14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Nasiruddin Al-bani, *Irwaul Ghalil Fi Tahkrij Hadist Manari As-sabil*, Beirut : Al-Maktabah Al-Islami, 1979, jilid 6

Murhayati Zein, *Fikih Munakahat*, Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015

Soemati, *Hukum Perkawinan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1997

Samsuhadi Irsyad, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999

Said Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Penerjemah Moh. Abidun Dkk, Jakarta : Cempaka Putih, 2011

Samsul Munir Amin, Kamus *Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, 2009, Cet ke-2

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2014, Cet ke-2

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. ke-3

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2011

#### WAWANCARA

Ayu, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 10 November 2018.

Demisi, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Desi, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Hes, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Iyos, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Irot, Orang Tua, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 10 November 2018.

Jahar, Manti Suku Piliang, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Musrianto, Niniak Mamak Suku Mandailiang, Wawancara, Jorong Nenang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, 24 Februari 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sholeh, Orangtua, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, 24 Februari 2019.

Siwing, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 24 Februari 2019.

Si'e, Orang Tua, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Siyai, Orang Tua, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Syafitri, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 10 November 2018.

Tinat, Orang Tua, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek 25 Februari 2019.

Yesi, Masyarakat yang melakukan *balamo-lamo maso batunangan*, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.

Zainal Arifin, Niniak Mamak Suku Pitopang, *Wawancara*, Jorong Nenang Nagari Maek, 25 Februari 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati langsung keadaan daerah yang di teliti
2. Melihat langsung hal-hal terjadi di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota
3. Melihat langsung dampak yang ditimbulkan oleh alasan *balamo-lamo maso batunangan* di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota
4. Melihat sikap *niniak mamak* dan orang tua terhadap pasangan yang melakukan tradisi *balamo-lamo maso batunangan*
5. Melihat perilaku pasangan yang melakukan kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Untuk Responden ( *Niniak mamak*, orang yang melakukan tradisi *balamo-lamo maso batunangan* dan orangtua )**

**PEDOMAN NINIAK MAMAK**

1. Apa yang dimaksud pertunangan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota ?
2. Apa tujuan dilakukan alasan *balamo-lamo maso batunangan*?
3. Apa alasan dilakukan *balamo-lamo maso batunangan*?
4. Bagaimana pandangan *niniak mamak* terhadap kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*?
5. Berapa lama masa pertunangan tersebut dilakukan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota?
6. Apa saja hal-hal yang terjadinya dalam kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*?
7. Apa saja yang ditimbulkan dari *balamo-lamo maso batunangan*?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN PIHAK YANG MELAKUKAN TRADISI *BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN* DAN ORANGTUA**

1. Apakah saudara/i mengetahui adanya *balamo-lamo maso batunangan* ini?
2. Apa alasan saudara/i melakukan kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*?
3. Berapa tahun lamanya saudara/i melakukan kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*?
4. Mengapa saudara/i melakukan tunangan terlalu lama?
5. Bagaimana tata cara anak Bapak/Ibuk melakukan kebiasaan *balamo-lamo maso batunangan*?
6. Apa saja yang terjadi setelah anak Bapak/Ibuk melaksanakan kebiasaan ini?
7. Apakah menurut Bapak/Ibuk kebiasaan ini diwajibkan bagi masyarakat Maek khususnya?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كافة الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4548/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Mei 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : GUSMILA  
NIM : 11521201494  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Tradisi Balamo-lamo Maso Batunangan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima  
Puluh Kota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117. PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/22975  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4548/2019 Tanggal 15 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

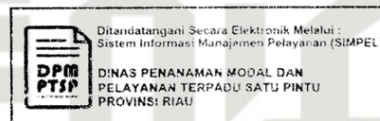
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : GUSMILA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11521201494   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TRADISI BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN DI NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTADITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : <b>JL. TAN MALAKA NAGARI MAEK KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membaruti kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Mei 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- ② Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.070 / 555 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2019

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, seria hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :**
- Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-R/SET/22975 tanggal 20 Mei 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : GUSMILA  
Tempat/Tanggal lahir : Nenang/25 Agustus 1996  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Nenang  
Nomor Kartu Identitas : 1307124302010001  
Judul : Tradisi Balamo-lamo Maso Batunangan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Lokasi Penelitian : Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota  
Jadwal penelitian : 20 Mei- 20 Oktober 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisny kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dihuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Juni 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DPM & PTSP  
MASWAR DEDI AP. M.Si.  
NIP. 19740618 199311 2001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Tembusan:**

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lima Puluh Kota

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

**REKOMENDASI**

Nomor : 300/202/BKBP-LK/VI/2019

Tentang

**IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: B.070/555-PERIZ/DPM&PTSP/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, Perihal : Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama : **GUSMILA**  
 Tempat/Tanggal Lahir : **Nenan, 25 Agustus 1996**  
 Pekerjaan : **Mahasiswi**  
 Alamat : **Jorong Nenang Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan**  
 NIK / NIM : **1307124302010001**  
 Judul Penelitian : **TRADISI BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN DI NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Lokasi Penelitian : **Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan**  
 Waktu Penelitian : **21 Juni s/d November 2019**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 21 Juni 2019  
 An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 Kabid KPM

**Dr. RASITON, M.Si**  
 NIP. 19640908 199103 1 002

**Tembusan kepada Yth:**

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Padang
3. Camat Bukik Barisan di Guntuang
4. Wali Nagari Maek di Maek

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KANTOR WALI NAGARI MAEK**  
 KECAMATAN BUKIK BARISAN

**SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN**

Nomor : 03/SKIP/WNM/VI-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: GUSMILA
Tempat Tgl Lahir	: NENAN / 25 Agustus 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jorong Nenang Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 11521201494
Judul Penelitian	: " TRADISI BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN DI NAGARI MAEK KEC.BUKIK BARISAN KAB.LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"
Lokasi Penelitian	: Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
Waktu Penelitian	: 20 Mei sampai 20 Oktober 2019

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka menyusun tesis yang berjudul " TRADISI BALAMO-LAMO MASO BATUNANGAN DI NAGARI MAEK KEC.BUKIK BARISAN KAB.LIMA PULUH KOTA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"

Demikianlah Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Maek  
 Pada Tanggal: 21 Juni 2019  
 WALI NAGARI MAEK

AFRIZ HENDRA

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP

**Gusmila** lahir di Nenang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Agustus 1996, anak Ketiga dari lima bersaudara lahir dari pasangan Gusriyal dan Minarti.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Gusmila adalah sebagai berikut SDN 09 Maek pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan pendidikannya ke MTsN Limbanang pada tahun 2009-2012. Setelah itu melanjutkan ke MAN Padang Jombang pada tahun 2012-2015. Tidak hanya sampai disitu, Gusmila melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ke UIN SUSKA RIAU pada September 2015 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dan Alhamdulillah masa studi di UIN SUSKA berakhir pada Oktober 2019 dengan perhitungan IX (sembilan) semester.

Pada masa perkuliahan Gusmila pernah aktif di organisasi Fk-Masya selanjutnya mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Tanjung Pati provinsi Sumatera Barat, dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Aro Kec. Taluak Kuantan Kab. Kuantan Tengah.

Sampailah dimana Gusmila melakukan penelitian dengan judul skripsi **Alasan Balamo-Lamo Maso Batunangan Pada Masyarakat Adat Di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota**". Akhirnya pada tanggal 23 Safar 1441 H/22 Oktober 2019 M, Gusmila dimunaqasah dalam sidang ujian Sarjana Program (S1) Hukum Keluarga (AH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Alhamdulillah dengan prediket kelulusan Sangat Memuaskan. Semoga hasil penelitian bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.